



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, Telp. 021- 27510964 Fax. 021-7220050

---

## *Press Release*

### **Terapkan WFH, Penyaluran FLPP Tetap Lancar**

Jakarta, 20 Maret 2020

Usai resmi disampaikan melalui pidato Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu terkait *Social Distancing* (pembatasan interaksi), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menindaklanjutinya melalui Surat Edaran Nomor 04/SE/M/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya sebagai salah satu unit organisasi yang bernaung di Kementerian PUPR, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tentu saja mematuhi kebijakan presiden tersebut dengan menerapkan pegawainya yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja di rumah masing-masing menggunakan interaksi *online*, dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai yang disampaikan pada SE Menteri pada huruf l butir 2 bahwa pelayanan publik secara tatap muka sedapat mungkin dialihkan kepada layanan online.

Pada tanggal 18 Maret 2020 PPDPP telah melakukan uji coba Pemberlakuan *Work From Home* (WFH) dengan menggunakan dukungan aplikasi *Hangout Meet*. Dari hasil dari uji coba tersebut, PPDPP menyatakan diri siap untuk menerapkannya pada tanggal 19 Maret 2020.

Meskipun WFH telah diterapkan, penyaluran FLPP tidak memiliki hambatan, dan berjalan sebagaimana biasanya. Tercatat di hari pertama penerapan WFH, PPDPP berhasil menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp43,9 Miliar yang diperuntukkan kepada 434 debitur. Capaian hari pertama tersebut menunjukkan bahwa pengalihan aktifitas kerja dari kantor ke rumah sama sekali tidak mengganggu kinerja PPDPP.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dalam evaluasi hari pertama penerapan WFH menyampaikan bahwa penerapan WFH di PPDPP berjalan 100% sesuai dengan instruksi Presiden RI "Ini adalah *addict* baru, penandatanganan surat pun dapat dilakukan dari rumah. Tidak ada batas ruang, batas waktu, dan batas tempat. Diharapkan mekanisme seperti ini tetap dipertahankan selama diberlakukannya WFH".

Tidak menutup kemungkinan, Arief Sabaruddin juga memandang ke depannya apabila *pandemic* Virus Corona di Indonesia telah usai, sistem kerja WFH di

beberapa bidang dapat terus diterapkan dengan mempertimbangkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi sistem kerja.

### **Penerapan WFH Sinergi dengan SiKasep**

WFH yang diberlakukan PPDPP bertujuan untuk mendorong publik agar menerapkan *social distancing* yang saat ini terus dihimbau oleh pemerintah. Mekanisme pembatasan interaksi ini juga telah disampaikan melalui akun sosial media PPDPP baik Facebook, Instagram, maupun website [ppdpp.id](http://ppdpp.id) yang menyebutkan PPDPP tetap membuka akses layanan interaksi kepada publik secara *online*, yaitu melalui Hotline di 0-800-10-77377 dan email di [hotline.ppdpp@gmail.com](mailto:hotline.ppdpp@gmail.com).

Kendati sudah dihimbau untuk membatasi interaksi, ternyata masih terdapat masyarakat yang berkunjung ke PPDPP untuk melakukan konsultasi. Mengantisipasi hal tersebut, PPDPP tetap menyediakan layanan *video teleconference* dengan menyediakan perangkat yang dapat terhubung langsung dan berkonsultasi dengan petugas yang menangani Aplikasi SiKasep.

Pengalaman konsultasi SiKasep melalui *video teleconference* sempat dirasakan oleh Tuwano yang berkunjung ke PPDPP pada tanggal 20 Maret 2020. Tuwano sengaja datang untuk meminta bantuan tim PPDPP menindaklanjuti pengajuannya yang sedang ditangani oleh Bank Pelaksana terhadap Perumahan Mutiara Puri Harmoni 2. Pria asal Bekasi tersebut merasa puas terhadap cara yang diterapkan oleh PPDPP tersebut, menilai *video teleconference* yang diterapkan cukup efektif “dengan keadaan seperti ini, *video call* adalah cara yang terbaik dan sangat membantu. Semoga nanti jika sudah kondusif layanan tatap muka bisa dilakukan kembali” ujar Tuwano.

Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) diluncurkan PPDPP pada akhir Desember 2019 lalu. Dengan alokasi anggaran di tahun 2020 sebesar Rp11 Triliun, sepanjang diberlakukannya aplikasi SiKasep hingga bulan Maret ini, penyaluran FLPP terus menunjukkan progress peningkatan.

Sejak Januari hingga Maret ini penyaluran FLPP menunjukkan peningkatan. Pada Bulan Januari FLPP yang telah disalurkan sebanyak 32 unit rumah, kemudian Bulan Februari menyalurkan sebanyak 3.192 unit rumah, dan per 20 Maret 2020 PPDPP telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP dengan nilai mencapai Rp907,49 Miliar untuk 9.007 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 20 Maret 2020 ini telah mencapai Rp45,303 Triliun untuk 664.899 unit rumah.

Adanya peningkatan realisasi ini menunjukkan bahwa saat ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah cukup menguasai penggunaan aplikasi tersebut. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aplikasi SiKasep juga tercatat dalam database PPDPP per 20 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, masyarakat yang telah menggunakan aplikasi SiKasep mencapai 116.186 pengguna terdaftar sebagai calon debitur, yang diantaranya sejumlah 42.471 pengguna dinyatakan lolos subsidi checking, sedangkan pengguna yang dalam proses verifikasi bank pelaksana mencapai 35.256 pengguna.

Dengan data tersebut, Arief Sabaruddin sampaikan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki data *realtime* terkait dengan sebaran kebutuhan rumah dan sebaran *supply* ketersediaan perumahan “Perlu kami informasikan juga bahwa keberadaan siKasep dan siKumbang tidak mengubah kebijakan yang ada akan tetapi lebih pada cara dan mengembalikan kepada jalur yang benar sesuai dengan UU PKP no. 1 tahun 2011, termasuk turunannya” ujarnya menambahkan.

Sekedar diketahui bersama, sebelumnya pada tahun 2015 penerapan layanan FLPP belum sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Kemudian pada tahun 2016 PPDPP meluncurkan sistem e-FLPP dan terus disinergikan dengan pengembangan sistem *big data* yang saat ini dimiliki PPDPP seperti SiKasep, SiKumbang, hingga *Host to Host*.

Rangkaian sistem tersebut menunjukkan bahwa saat ini PPDPP telah menerapkan proses bisnis hampir sepenuhnya secara elektronik, mulai dari mencari rumah, hingga menetapkan bank pelaksana dan memilih perumahan, seluruhnya dilaksanakan secara elektronik. PPDPP menitikberatkan bahwa MBR saat ini perlu untuk ditempatkan sebagai Subjek bukan lagi Objek, MBR yang memilih Bank pelaksana sesuai keinginannya, dan MBR juga yang menetapkan Perumahan yang dipilihnya atau mengusulkan lokasi yang diinginkannya.

Seiring dengan adanya himbauan dari pemerintah terkait dengan *Sosial Distancing* dalam rangka meminimalisir penyebaran Virus Covid-19 (Corona), masyarakat dihimbau untuk menggunakan kanal Hotline maupun email yang telah disediakan. Selain itu layanan informasi tersebut juga dapat diperoleh melalui bank pelaksana penyalur FLPP yang telah bekerjasama dengan PPDPP.

---

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Humas PPDPP  
Jl. Palatehan I No. 27, Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Telp. 021 – 27510964.  
Website: [www.ppdpp.id](http://www.ppdpp.id).  
Hotline : 0 – 800 – 10 - 77377 (bebas pulsa)  
Email : [hotline.ppdpp@gmail.com](mailto:hotline.ppdpp@gmail.com)

